

**EFEKTIVITAS REVIU BERJENJANG DALAM PENINGKATAN
KUALITAS LAPORAN HASIL PENGAWASAN DI BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SUMATERA
SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Dalam mencapai Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

HABIB ADITYA

07011281621086

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
EFEKTIVITAS REVIU BERJENJANG DALAM
PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN HASIL
PENGAWASAN DI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

HABIB ADITYA

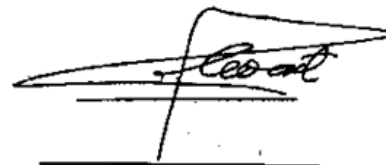
07011281621086

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, Agustus 2020

Pembimbing I

Drs. Joko Siswanto, M.Si

NIP.195706051985031003



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joko Siswanto', written over a horizontal line.

Pembimbing II

Dra. Martina, M.Si

NIP. 196603051993022001



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martina', written over a horizontal line.

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas Reviu Berjenjang dalam Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pengawasan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 25 November 2020.

Palembang, 25 November 2020

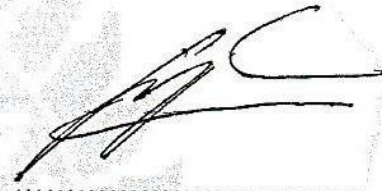
Ketua

1. Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031003



Anggota

2. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001



3. Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002



4. Dwi Mirani, S.Ip., M.Si
NIP. 1981106082008122002

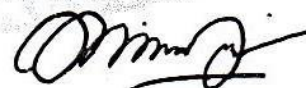


Mengetahui,
Dekan FISIP



Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos. MPA
NIP. 198108272009121002

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : “Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

(Imam Asy-Syafi’i)

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

- ❖ *Kedua orangtuaku Suyitno dan Darli Yusnidar yang selalu sabar dan selalu mendukung dan mendoakan*
- ❖ *Adikku Putri Amelinda yang selalu memberi support*
- ❖ *Nenek dan Paman - paman*
- ❖ *Hanifah Syafira yang selalu memberi semangat dan dukungan*

Almamater yang menjadi kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Segala puji serta rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Reviu Berjenjang dalam Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pengawasan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan” yang merupakan tugas serta kewajiban guna untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Segala bantuan serta bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, sehubungan dengan itu penulis ingin memberikan ucapan terimakasih sebesar - besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Suyitno dan Ibu Darli Yusnidar serta saudara-saudara yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing, dan memberikan kritik saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
7. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing, dan memberikan kritik saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
8. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan solusi dan saran dalam perkuliahan.
9. Seluruh pihak Perwakilan BPKP Sumatera Selatan yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian serta bimbingannya.
10. Seluruh Dosen, Staf, Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya.
11. Sahabat dan teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dari semua pihak demi skripsi ini. Semoga

skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat dikemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Indralaya, Desember 2020

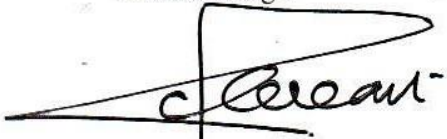
Habib Aditya

ABSTRAK

BPKP sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berperan sebagai pemberi *assurance* dan *consultant*. Hal ini membutuhkan perbaikan proses intern yang berkelanjutan agar ketaatan pada standar tetap terjaga dan kualitas proses dan hasil pengawasan dapat terus meningkat. Dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, dinyatakan bahwa reuiu atas laporan hasil pengawasan oleh APIP dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Efektivitas Reuiu Berjenjang dalam Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pengawasan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini berupa Deskriptif Kualitatif yang mengkaji data dari wawancara dan pengamatan langsung yang didukung dengan data primer dan data sekunder dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Selatan. analisis pada penelitian ini berupa melihat efektivitas dari proses reuiu berjenjang dengan mengacu pada tiga dimensi yaitu optimasi tujuan, perspektif sistem serta tekanan terhadap perilaku. Setelah dilakukan penelitian dapat dilihat bahwa penerapan reuiu berjenjang dalam peningkatan kualitas laporan hasil pengawasan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sudah efektif.

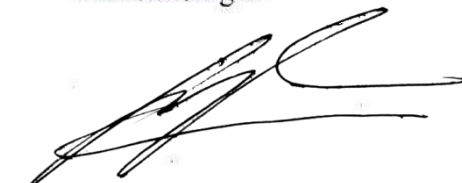
Kata Kunci: BPKP, APIP, Reuiu Berjenjang.

Pembimbing I



Drs. Joko Siswanto, M.Si
NIP.195706051985031003

Pembimbing II



Dra. Martina, M.Si
NIP.196603051993022001

Indralaya, Desember 2020

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA


NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

BPKP as a part of the Government Internal Supervisory Institution acts as an assurance and consultant provider. This requires continuous improvement of internal processes to maintain compliance with standard and the quality of processes and results of supervision can continue to improve. In article 33 of Government Regulation Number 8 of 2006, it is stated that the review of reports on the results of supervision by APIP is in order to ensure the reliability of the information presented in the report. This study aims to determine the effectiveness of tiered reviews in improving the quality of the monitoring results report at the Financial and Development Supervisory Agency of South Sumatra Province. This research is a qualitative descriptive study that examines data from interviews and direct observation supported by primary data and secondary data from the Representative of the South Sumatra Financial and Development Supervisory Agency. The analysis in this study is to see the effectiveness of the tiered review process by referring to three dimensions, namely optimization of objectives, systems perspective and pressure on behavior. After conducting the research it can be seen that the application of tiered reviews in improving the quality of the monitoring results report at the South Sumatra Province Financial and Development Supervisory Agency has been effective.

Keywords: BPKP, APIP, Tiered Review

Advisor I



Drs. Joko Siswanto, M.Si

NIP.195706051985031003

NIP.196603051993022001

Advisor II



Dra. Martina, M.Si

Indralaya, Desember 2020

Head of Department Public Administration

Faculty of Sosial and Political Science

Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA

NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Landasan Teori	19
1. Efektivitas.....	19
2. Reviu	22
3. Reviu Berjenjang.....	25
4. Kualitas Laporan	27
B. Kerangka Pemikiran.....	28
C. Penelitian Terdahulu	29
BAB III	32
METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Metode Penelitian	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Definisi Konsep	33
D. Fokus Penelitian.....	34
E. Jenis Dan Sumber Data.....	35
F. Informan Penelitian.....	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Teknik Analisis Data.....	38
I. Jadwal Kegiatan Penelitian	40
BAB IV	41
HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum BPKP.....	41
1. Sejarah BPKP	41
2. Tugas Dan Fungsi.....	44
3. Visi, Misi, Motto	46
4. Sumber Daya Manusia	47
5. Struktur Organisasi BPKP Sumatera Selatan	48
B. Analisis Efektivitas Reviu Berjenjang BPKP Sumatera Selatan	50
BAB V	72
PENUTUP	72

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Definisi Konsep	38
Tabel 4.1 Perjanjian Kinerja IPP POLHUKAM BPKP Sumatera Selatan	61
Tabel 4.2 Perjanjian Kinerja IPP Persekonomian BPKP Sumatera Selatan	63
Tabel 4.3 Data Pegawai BPKP Perw. Sumatera Selatan	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Fraud paling banyak di Indonesia	10
Gambar 1.2 Fraud paling merugikan di Indonesia.....	11
Gambar 1.3 Struktur BPKP Sumatera Selatan.....	15
Gambar 1.4 Kerta Kerja Audit.....	19
Gambar 1.5 Bagan/alur reviu berjenjang	21
Gambar 2.1 Kertas Kerja Reviu.....	33
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4.1 Sejarah BPKP.....	45
Gambar 4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	51
Gambar 4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	52
Gambar 4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	52
Gambar 4.5 Struktur BPKP Sumatera Selatan.....	54
Gambar 4.6 Cover Laporan Hasil Pengawasan Bersifat Konsep.....	56
Gambar 4.7 Kertas Kerja Audit	57
Gambar 4.8 <i>Routing Slip</i>	59
Gambar 4.8 Cover Laporan Hasil pengawasan bersifat final	60

DAFTAR SINGKATAN

AAIPI	: Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
ACFE	: <i>Association of Certified Fraud Examiners</i>
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
BPK	: Badan Pengawasan Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
Dalnis	: Pengendali Teknis
DAN	: Djawatan Akuntan Negara
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
IPP	: Instansi Pemerintah Pusat
Itwilkab	: Inspektorat Wilayah Kabupaten
Itwilprop	: Inspektorat Wilayah Provinsi
JFA	: Jabatan Fungsional Auditor
Keppres	: Keputusan Presiden
KKA	: Kertas Kerja Audit
KKR	: Kertas Kerja Reviu
Korwas	: Koordinator Pengawasan
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Perpres	: Peraturan Presiden
PHLN	: Pengawasan atas proyek pinjaman hutang luar negeri

POLHUKAM : Politik Hukum dan Keamanan

PPM : Program Pelatihan Mandiri

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara	81
Lampiran 9:Perpres RI No. 192 Tahun 2014 Tentang BPKP	82
Lampiran 10: Perpres RI No. 9 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	88
Lampiran 11: Permen Keuangan No. 09 Tahun 2015 Tentang Standar Reviu LKPP Kemenkeu RI.....	90

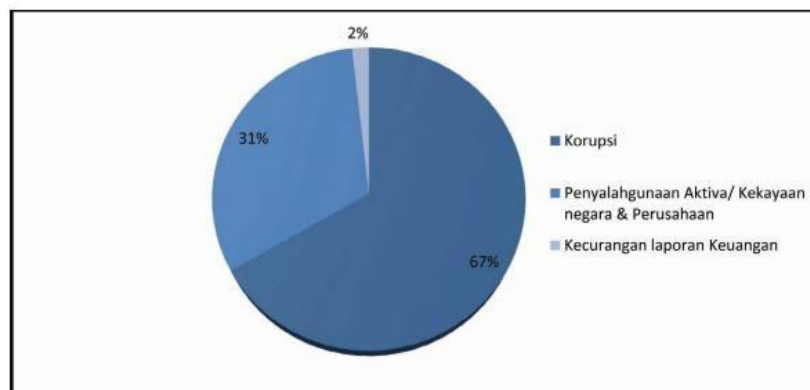
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah mengelola negara dalam kaitannya dengan masalah keuangan mencakup dana besar, sehingga perlu adanya pertanggungjawaban atas penggunaan dana guna penyelenggaraan pemerintahan yang sudah seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang mumpuni dalam rangka menjamin pemerataan dana pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa di pertanggungjawabkan. Menurut hasil penelitian *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global* menunjukkan bahwa setiap tahun rerata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban *fraud*. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan ACFE Indonesia. Berdasarkan hasil survei dari ACFE Indonesia juga terdapat persentase dari fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia. Sebanyak 67% fraud berupa korupsi, dalam survei fraud Indonesia sendiri *asset misappropriation* sebanyak 31% . *fraud* berupa laporan keuangan sebanyak 2%.

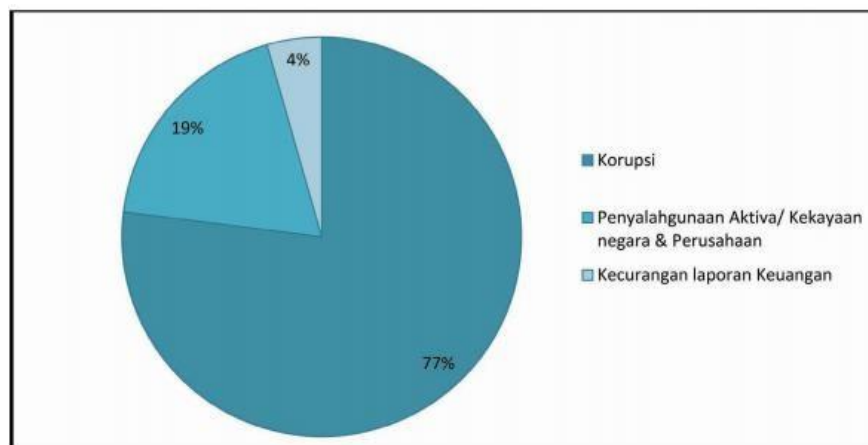
Gambar 1. Fraud yang paling banyak di Indonesia



Sumber: ACFE Indonesia

Tetapi hal persentase ini juga bisa saja disebabkan karena pengalaman dari setiap *responded* yang berbeda ditambah lagi banyaknya publikasi kasus korupsi yang dilakukan oleh media massa. Korupsi juga masih menjadi fraud yang paling merugikan di Indonesia yaitu 77% dari 178 kasus, penyalahgunaan aktiva sebanyak 19% dari 41 kasus dan kecurangan laporan keuangan sebanyak 4% dari 10 kasus.

Gambar 2. Fraud yang paling merugikan di Indonesia



Sumber: ACFE Indonesia

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga intern pemerintah, memberikan jaminan atas penggunaan anggaran pemerintah. lembaga pengawasan tersebut, terdiri dari Inspektorat JendraI Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan Lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (ItwiIprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (ItwiIkab/ItwiIkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen. Dari banyaknya lembaga audit pemerintah semuanya memiliki ruang lingkup dan pertanggungjawaban kerja yang berbeda, seperti halnya BPKP disebut sebagai Auditor Internt Pemerintah. Secara hierarki disebut sebagai lembaga *vertical*

artinya dibawah kementrian keuangan dan bertanggungjawab kepada Presiden. Berbeda dengan BPK yang merupakan lembaga audit independen tetapi setara dengan lembaga tinggi negara dan pertanggungjawaban dilakukan kepada DPR. Hal ini ditujukan agar setiap lembaga terjaga independensi nya sebagai lembaga auditor pemerintah. Tetapi sama – sama menjalankan fungsi audit internal.

Kualitas kinerja berbading lurus dengan proses kerja yang dilakukan auditor. Kualitas kerja dapat dilihat melalui bagaimana auditor tersebut dilakukan, dihasilkan dan dinilai dari jumlah auditor yang memberikan tanggapan membenaran atas audit yang diselesaikannya. Selain itu, kompetensi dan independensi auditor dalam prakteknya akan berkaitan langsung terhadap etika. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) mendorong dilakukannya program penjaminan dan pengembangan mutu. Sebagai auditor Intern Pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan maka sudah selayaknya menjamin kualitas mutu laporan yang nanti akan diterbitkan. Program penjaminan dan pengembangan mutu dilakukan melalui penilaian intern dan ekstern. Program penilaian dilakukan melalui supervisi terus - menerus dan penilaian secara periodik, setiap semester atau tahunan. Program penilaian dapat dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dalam hal ini bisa dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan bagian dari APIP yang memberikan jaminan serta konsultasi terhadap beberapa area risiko, pengendalian dan tatakelola. Diterbitkannya PP No. 60 Tahun 2008 Tentang tugas pengawasan Badan Pengawsan Keuangan Pembangunan yang memberikan jaminan serta konsultasi. Hal tersebut memerlukan perhatian besar terhadap

proses intern yang berkelanjutan untuk agar ketaatan terhadap standar terjaga dan kualitas pengawasan mengalami peningkatan. Pada pasal 33 PP No. 8 Tahun 2006, menyatakan reuiu terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan serta keandalan informasi yang disajikan dalam laporan. Reuiu berguna memberikan keyakinan akurasi, keandalan, serta keabsahan informasi yang nantinya akan disajikan dalam laporan hasil pengawasan (auditing). Pandangan pimpinan BPKP saat ini kualitas proses dan hasil pengawasan belum optimal serta terdapat banyak area yang harus ditingkatkan.

Pendekatan yang dapat digunakan guna meningkatkan dan memelihara *quality assurance* serta program pengembangan tersebut adalah konsep manajemen mutu. Manajemen mutu adalah kerangka dasar guna meningkatkan kualitas audit secara sistematis, mengingat usaha meningkatkan kualitas audit tidak dapat dilaksanakan apabila hanya dilakukan oleh auditor secara individu maupun tim. Salah satu cara untuk mengetahui hal itu melalui laporan hasil pengawasan.

Gambar 1.3 Struktur Organisasi BPKP Perwakilan Sumatera Selatan



Sumber: Website Resmi Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Sumatera Selatan

Dalam BPKP sendiri terdapat beberapa bidang kerja yang masing – masing memiliki tugas dan fungsi khusus dalam menjalankan operasionalnya sebagai lembaga audit intern pemerintah. Diantara bidang tersebut yaitu, Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Bidang Akuntan Negara dan Bidang Investigasi. Peneliti dalam hal ini memfokuskan pembahasan pada satu bidang yaitu bidang pengawasan Instansi Pemerintah Pusat yang terbagi menjadi dua bidang yaitu, bidang perekonomian dan kemaritiman serta bidang POLHUKAM, pembangunan manusia dan kebudayaan.

Berdasarkan tugas dari bidang pengawasan IPP serta mengacu pada fungsinya memberikan *assurance* dan *consulting* maka instansi pemerintah pusat melakukan evaluasi atas laporan pengawasan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor inilah yang disebut proses reviu berjenjang. Dalam pembuatan laporan hasil pengawasan tim audit yang bertugas melakukan *auditing* menggunakan Kertas Kerja Audit sebagai media dalam proses dokumentasi catatan, dokumen serta bukti yang berhasil dikumpulkan dan disimpulkan. Lalu, hasil laporan pengawasan yang di buat auditor dalam setiap tahap *auditing*. Menjaga mutu dalam setiap proses reviu berjenjang khususnya menjadi hal penting guna menjaga kualitas laporan. KKA yang di buat anggota akan direviu oleh ketua, dalnis, dan korwas. Dilakukannya reviu berguna untuk meyakinkan audit di jalankan berdasar pada PKA, dan kesimpulan audit dibuat atas bukti-bukti kompeten yang cukup.

Gambar 1. 4 Contoh Kertas Kerja Audit

..... (Nama Instansi Auditor)				No. KKA :			
Nama Auditi :				No. PKA :			
Tahun Yang diaudit :				Program Kerja Audit			
				Audit Kinerja atas			
A. Pendahuluan							
B. Tujuan Audit							
C. Langkah Kerja Audit							
No.	Uraian	Dikerjakan oleh		Waktu yang diperlukan		No. KKA	Catatan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
.....2012			2012			
Direviu oleh: Pengendali Teknis				Disusun oleh: Ketua Tim			
NIP				NIP			
			2012			
				Disetujui oleh: Pengendali Mutu			
				NIP			
						
				NIP			

Sumber: Laporan Hasil pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat BPKP Sumatera Selatan

Proses reviu ini dipergunakan sebagai cara guna memastikan apakah audit di jalankan sesuai dengan program audit dan untuk memastikan bahwa hasil audit benar-benar dituangkan dengan benar sesuai dengan data yang ada dilapangan. Karena dalam proses reviu ini masih banyak sekali kesalahan – kesalahan yang muncul dan hal ini tentu dapat memengaruhi kualitas laporan hasil pengawasan. Permasalahan disiplin pegawai masih menjadi hal serius karena berdasarkan pengamatan di lapangan terdapat auditor-auditor yang tidak menyelesaikan laporan hasil pengawasan dengan tepat waktu, penekanan terhadap optimalisasi peran dan fungsi dari pereviu dirasa masih kurang, kondisi demikian tidak seharusnya terjadi mengingat BPKP sendiri sebagai lembaga audit internal pemerintah tentu dibebankan dengan tugas-tugas lain yang sangat melibatkan para auditor untuk terjun langsung kelapangan, ditambah lagi masih banyak pegawai yang harus dipantau dalam menyelesaikan kewajibannya dalam membuat laporan hasil pengawasan. Permasalahan spesifik sendiri seperti permasalahan deteksi salah saji, kesalahan metodologi, serta kemungkinan adanya gratifikasi oleh pihak yang berkepentingan. Mengingat lembaga pengawasan dan keuangan sendiri

rentan dengan hal-hal tersebut. Maka dari itu revidi berjenjang dirasa sangat diperlukan untuk mengurangi masalah-masalah diatas, walaupun bukan satu-satunya cara dalam mengatasi tetapi ini merupakan cara terbaik yang telah digunakan BPKP sendiri dalam memaksimalkan pembuatan laporan hasil pengawasan.

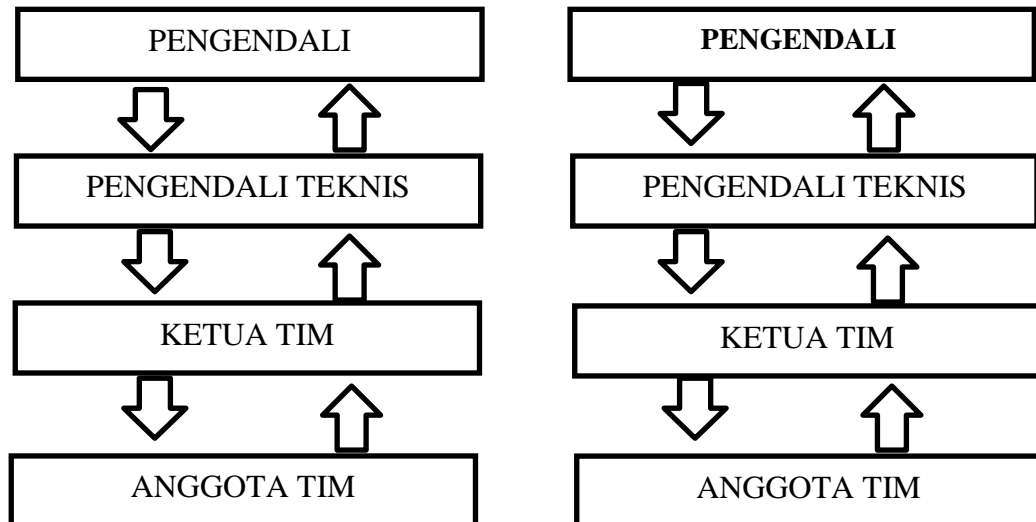
Koreksi yang dilakukan oleh pihak terkait harus detail dan netral berdasarkan hasil audit yang ada di lapangan. Setelah diserahkan kepada ketua tim jika tidak ada perbaikan maka laporan layak untuk dibahas dan diserahkan kepada pengendali teknis, setelah diserahkan kepada pengendali teknis, dibahas dan jika layak maka disetujui pengendali mutu/korwas. Ini bukanlah tahap akhir dari proses revidi berjenjang melainkan setelah disetujui oleh pengendali mutu/korwas baru nantinya laporan dapat diserahkan kepada kepala perwakilan untuk diperiksa kembali sebelum nantinya diserahkan kepada tim yang melakukan audit. Dan setiap tahapan revidi berjenjang terdapat symbol dan paraf setiap pihak yang terkait.

Berikut symbol/warna pena yang dipergunakan dalam revidi berjenjang:

1. Pena warna Hijau menunjukkan bahwa yang melakukan koreksi adalah pengendali teknis.
2. Pena warna biru menunjukkan bahwa yang melakukan koreksi adalah ketua tim.
3. Pena warna Hitam menunjukkan bahwa yang melakukan koreksi adalah Pengendali Mutu/Korwas.

4. Warna Biru toska Menunjukkan bahwa telah dikoreksi oleh Kepala Perwakilan.

Gambar 1.5 Bagan atau alur Reviu Berjenjang



Sumber: Website resmi BPKP Sumatera Selatan

Oleh karena laporan hasil pengawasan bersifat sangat penting dan berkaitan erat dengan penggunaan uang negara maka harus dilakukan pengawasan yang ketat serta dalam proses pembuatan laporan harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan agar nantinya dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan khususnya pada Bidang Intansi Pemerintah Pusat BPKP Sumatera Selatan. Berdasar pada apa yang telah diuraikan diatas terkait masalah yang ada maka sangat penting untuk dilakukannya reviu berjenjang secara efektif.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah reviu berjenjang efektif terhadap peningkatan kualitas laporan hasil pengawasan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Reviu Berjenjang Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pengawasan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Selatan.

D. MANFAAT PENELITIAN

manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu administrasi publik serta menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang berkeinginan melakukan penelitian yang juga berkaitan dengan pengaruh reviu berjenjang terhadap kualitas laporan hasil pengawasan.
2. Secara praktis, memberikan *input* bagi pihak terkait, yang dalam hal ini penguatan manajemen mutu, dari perspektif kajian Manajemen Publik serta dapat memberikan *feedback* bagi pimpinan organisasi dalam pembuatan keputusan terkait Manajemen mutu melalui reviu berjenjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agoes, Sukrisno. 2004. *Auditing: Pemeriksaan akuntan*, edisi 3. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). *Pedoman Telaah Sejawat*. Di unduh 22 Juli 2019.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia. *Survei Fraud Indonesia*. 2016
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Deddy, Mulyana. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Denzin. Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyanto dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Fandy, Tjiptono. 2004. *Manajemen Jasa, Edisi Pertama*, Yogyakarta. Andi Offset.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research Jilid III*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Handyaningrat. Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Maleong, J, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardisar dan Sari. 2007. *Pengaruh Akuntabilitas dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor*.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Patton. 1980. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1996. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Prof. Dr. H. Edy Sutrisno. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenata Media. Hal. 95-97.
- Pusdiklatwas BPKP. 2005. *Kode etik dan Standar Audit*. Edisi Ke-4 Pustaka.
- Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta
- Siagian, 2008 *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Steers. M. Richard. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Journal

Alim dkk. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Berbagai Variabel Moderasi. Simposium Nasional Akuntansi X: Makasar

Simanjuntak, Piter. 2008. Pengaruh Time, Budget, Pressure dan Resiko Kesalahan Terhadap Penurunan Kualitas Audit, Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Taufik Effendi. 2010. Pengaruh Kompetensi, independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro. Semarang.

Wilkinson, J, 2008. Accounting Information System Essential Concept and Application 4 edition. New York. USA: John Willey & Sons Inc.

Wooten, T, G. 2003. It is Impossible to Know The Number of Poor-Quality audits that simply go undetected and unpublicized. The CPA Journal, Januari.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Keuangan No. 09 Tahun 2015 Tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Website

<http://www.Bpkp.go.id?puslitbangwas/konten/1507/11.1102-Reviu-Berjenjang-dalampenugasan-pengawasan-bpkp>, diakses 22 Juli 2019

Data

Perjanjian Kinerja Tahunan dan Triwulan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Selatan Tahun 2019.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Selatan.

Data Subbagian Kepegawaian Per November 2019